SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 9 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititik-beratkan pada system prestasi kerja sangat diperlukan adanya data kepegawaian;

b. bahwa untuk adanya data kepegawaian yang lengkap perlu dilakukan penyusunan dan pemeliharaan Tata Usaha Kepegawaian yang tertib, teratur dan terus menerus;

c. bahwa untuk dapat menyusun dan memelihara data-data kepegawaian yang lengkap dalam suatu Tata Usaha Kepegawaian maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan, dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 287 Tahun 1970, tentang Bentuk dan Isi Kartu Pegawai;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);

19. Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 54 Seri D);

20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2003, tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan Kepegawaian adalah Rangkaian Kegiatan Tata Usaha Kepegawaian yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
2. Data kepegawaian adalah segala bentuk mutasi pegawai;
3. Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil;
4. Bentuk dan jenis Tata Usaha Kepegawaian adalah format dan jenis-jenis buku catatan kepegawaian yang digunakan untuk mencatat setiap data kepegawaian;
5. Dinas, Badan dan Lembaga adalah Dinas Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
6. Pengelola Tata Usaha Kepegawaian adalah Pejabat / Pengelola Kepegawaian pada Dinas, Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Penatausahaan Kepegawaian adalah sebagai acuan dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar Sistem Karier dan Prestasi Kerja yang dititik-beratkan pada Sistem Prestasi Kerja yang meliputi :

a. Tersedia data kepegawaian yang tepat, lengkap dan dapat dipercaya;
b. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian;
c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
d. Sebagai bahan dalam pengolahan data dengan menggunakan teknologi computer (Sistem Informasi Kepegawaian).
e. Terselenggaranya pembinaan pegawai secara obyektif, accountable dalam mewujudkan profesionalisme aparatur.

Bagian Kedua
PENGELOLA TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Pengelola Tata Usaha Kepegawaian pada Dinas, Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Pejabat / Pengelola Kepegawaian pada masing-masing satuan organisasi.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tertib pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian wajib menyampaikan dan atau memberikan data kepegawaian kepada pengelola kepegawaian.

BAB III
JENIS BUKU TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan Penatausahaan Kepegawaian diperlukan jenis-jenis buku Tata Usaha Kepegawaian yang terdiri dari

1. Buku Data Umum Pegawai.
2. Buku Induk Pegawai Negeri Sipil.
3. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat.
4. Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala.
5. Buku Register Cuti.
6. Buku Register Penjagaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
7. Buku Daftar Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
8. Rekapitulasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).
9. Buku Register Tanda Jasa / Penghargaan.
10. Buku Hukuman Disiplin PNS.
11. Buku register Ijin Perkawinan dan Perceraian.
12. Buku Pengangkatan dalam Jabatan / Perpindahan.
13. Tata Naskah Pegawai atau File Pegawai Perorangan (TAKAH).

Pasal 6

Pedoman bentuk dan jenis buku Tata Usaha Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Buku Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila memungkinkan dapat diselenggarakan dengan menggunakan computer yang dapat dicetak (print out) apabila diperlukan, kecuali nomor 13 Tata Naskah Pegawai atau File Pegawai Perorangan (TAKAH)).

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Tata Usaha Kepegawaian yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

PENGAWASAN

Pasal 9

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian secara tertib dan terus menerus dilaksanakan pengawasan dan pengendalian yaitu :

a. Pembinaan penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah setiap enam bulan sekali.

b. Pengawasan melekat Kepala Satuan / Unit Kerja yang bersangkutan.

c. Badan Pengawasan Daerah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap terselenggaranya Tata Usaha Kepegawaian.

Bagian Kedua
PELAPORAN

Pasal 10

Setiap pengelola kepegawaian pada setiap unit organisasi wajib menyampaikan pelaporan kegiatan Penatausahaan Kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Daerah setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juni 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JUNI 2005
TENTANG : PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS BUKU TATA USAHA KEPEGAWAIAN
I. DATA UMUM PEGAWAI

Photo
2 X 3

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol (100%) :
4. Tanggal Lahir :
5. Tempat Lahir :
6. Agama :
7. Alamat :
8. Pendidikan
   a. Umum :
      SD ..... Lulus Tahun .....
      SMP ..... Lulus Tahun .....
      SMA ..... Lulus Tahun .....
      D-1 ..... Lulus Tahun .....
      D-2 ..... Lulus Tahun .....
      D-3 ..... Lulus Tahun .....
      S-1 ..... Lulus Tahun .....
      S-2 ..... Lulus Tahun .....
   b. Khusus :
9. Keluarga :
   a. Orang Tua (Bapak)
      Nama :
      Pekerjaan :
      Agama :
      Alamat :
   a. Orang Tua (Ibu)
      Nama :
      Pekerjaan :
      Agama :
      Alamat :
10. Istri/Suami
    Nama :
    Tangngal Lahir :
    Pekerjaan :

Agama :
Nikah : Tanggal bulan Tahun
di
Alamat :
Istri/suami ke :

11. Anak

No	Nama	Laki-laki/Perempuan	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Keterangan
1	2	3	4	5	6

II. BUKU INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Urut	NIP Persetujuan	Nama	KARPEG	Tempat Dan Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	SURAT KEPUTUSAN							
							Dari	Nomor	Tanggal	TMT	Gol Ruang	Jabatan	Tempat Bekerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

SURAT KEPUTUSAN							
Dari	Nomor	Tanggal	TMT	Gol Ruang	Jabatan	Tempat Bekerja	Keterangan
8	9	10	11	12	13	14	15

III. BUKU PENJAGAAN KENAIKAN PANGKAT

No. Urut	Nama Tempat/Tgl Lahir	NIP	KARPEG	PNS		KEPUTUSAN									Kenaikan Pangkat yang akan Datang								Keterangan
				Pusat	Daerah	Pejabat Yang Berwenang	Tanggal	Nomor	Pangkat	Golongan Ruang	Gaji Pokok	TMT	MK. Gol										
													Tahun	Bulan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

IV. BUKU PENJAGAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

No. Urut	Nama Tempat/Tgl Lahir	NIP dan KARPEG	Tempat Bekerja	PNS		Surat Pemberitahuan Gaji Berkala							Kenaikan Gaji yang akan Datang								Keterangan
				Pusat	Daerah	Pejabat Yang Berwenang	Tanggal	Nomor	MK. Gol		Gaji Pokok	TMT									
									Tahun	Bulan			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

V. REGISTER CUTI

NOMOR SP/PK	TANGGAL	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN	TMT	JENIS CUTI DAN LAMA CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. REGISTER PENJAGAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	UNITKERJA BAGIAN/DINAS	GOLONGAN		MULAI PENSIUN	KETERANGAN
					MASA AKTIP	SETELAH PENSIUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VII. DAFTAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	NIP	JABATAN/PEKERJAAN	PANGKAT/GOL	NAMA DIKLAT	DARI TGL S/D TGL	JUMLAH DIKLAT	TEMPAT DIKLAT	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

VIII. REKAPITULASI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP-3)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	ASPEK YANG DINILAI								JUMLAH	RATA-RATA
							Kesetiaan	Prestasi Kerja	Tanggungjawab	Ketaatan	Kejujuran	Kerjasama	Prakarsa	Kepemimpinan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

IX. REGISTER TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEPUTUSAN			TANDA JASA/PENGHARGAAN		KETERANGAN
				Pejabat	Tgl/Bln/Th	Nomor	NAMA	BENTUK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X. HUKUMAN DISIPLIN PNS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEPUTUSAN			HUKUMAN		KETERANGAN
				Pejabat	Tgl/Bln/Th	Nomor	Jenis Hukuman	TMT/sampai Dengan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

XI. REGISTER IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA	KEPUTUSAN			JENIS IZIN		KETERANGAN
					Pejabat	Tgl/Bln/Th	Nomor	Keputusan Izin Perceraian	Rekomendasi/ Ket Izin Perceraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JUNI 2005
TENTANG : PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUKU PENGANGKATAN DALAM JABATAN / PERPINDAHAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEPUTUSAN			DIANGKAT/DIPIHDAKAN			KETERANGAN
				Pejabat	Tgl/Bln/Th	Nomor	Diangkat dalam jabatan	Dipindahkan ke	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JUNI 2005
TENTANG : PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TATA NASKAH PEGAWAI ATAU FILE PEGAWAI (PERORANGAN) TERDIRI DARI :

1. Data Umum Pegawai
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (80%)
3. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (100%)
4. Fotocopy Surat Keputusan tentang Pangkat/Golongan awal s/d terakhir
5. Fotocopy Surat Keputusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala
6. Fotocopy Ijazah/STTB dari sekolah dasar s/d terakhir
7. Fotocopy Ijazah/Sertifikat, kursus-kursus dan pendidikan keterampilan lainnya termasuk Seminar dan lokakarya
8. Fotocopy Sertifikat Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Pimpinan/Struktural
9. Fotocopy Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
10. Fotocopy SK Jabatan Struktural/Fungsional
11. Fotocopy Pelatihan Jabatan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
12. Fotocopy Hukuman Disiplin PNS
13. Fotocopy Surat Perindahan Tempat Tugas
14. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksannaan Pekerjaan (DP-3)
15. Fotocopy Akta Nikah
16. Fotocopy Akta Anak
17. Fotocopy Surat Ijin Perceraian dan atau Keterangan melakukan Perceraian
18. Fotocopy Surat Keputusan Perhitungan Masa Kerja
19. Fotocopy Akta Perceraian
20. Fotocopy Kartu Pegawai
21. Fotocopy Kartu TASPEN
22. Fotocopy KARIS/KARSU
23. Fotocopy Keputusan Tugas/Ijin Belajar

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.IP.